

STUDI TENTANG PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (BPMD) DALAM PEMBANGUNAN DESA DI DESA TANJUNG LAPANG KECAMATAN MALINAU BARAT KABUPATEN MALINAU

Astrella Janice¹

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan studi tentang tugas dan fungsi badan pemberdayaan masyarakat desa (BPMD) dalam pembangunan desa di desa tanjung lapang kecamatan malinau barat kabupaten malinau.

Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif yang diawali dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan, observasi, dan wawancara dokumentasi untuk mendapatkan data yang lebih jelas sesuai dengan yang dibutuhkan dalam penelitian.

Dari hasil penelitian yang diperoleh gambaran secara keseluruhan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) dalam pembangunan desa di desa Tanjung lapang sudah berjalan cukup baik ini dibuktikan dengan beberapa program kerja dari BPMD yang terealisasi ini tak lepas dari peran BPMD yang mampu mengajak masyarakat ikut turut serta dalam pembangunan desa dan membangun komunikasi dengan dinas-dinas terkait untuk membantu jalannya serangkaian pembangunan desa.

Masyarakat juga sangat terbantu dengan fasilitas-fasilitas yang dibangun BPMD sehingga membuat kinerja dari masyarakat juga ikut terbantu sehingga akan dapat menaikkan perekonomian masyarakat desa tanjung lapang itu sendiri.

Kata Kunci : *Tugas dan Fungsi, BPMD dan Pembangunan Desa.*

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia merupakan negara kesatuan yang demokrasi. Demokrasi pada hakekatnya merupakan sistem pemerintahan yang berasal dari, oleh dan untuk rakyat. Salah satu wujud dari penerapan demokrasi di Indonesia saat ini adalah pemberian hak sekaligus wewenang otonomi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dalam hal penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh, pendelegasian wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang di maksudkan agar daerah-daerah yang secara geografis jauh dari pemerintahan pusat dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara cepat dan merata, dalam hal mencapai tujuan dan cita-cita negara republik Indonesia.

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Univewrsitas Mulawarman. Email: ellaforza@gmail.com

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, program pemberdayaan masyarakat dipercaya pemerintah dapat mengurangi kesenjangan ekonomi antara masyarakat desa dengan kota di Indonesia. Kebijakan pemberdayaan masyarakat tertuang didalam ketentuan Undang-undang 32 Tahun 2004 Tentang pemerintahan daerah, yang menjelaskan "pemberian otonomi yang luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat". Dengan demikian pelaksanaan pemberdayaan masyarakat lebih diprioritaskan dan di orientasikan kepada ketertinggalan dan kemiskinan sebagai suatu kondisi sosial ekonomi masyarakat

Upaya pembangunan yang telah di canangkan oleh pemerintah Orde Baru selama ini kurang berhasil dalam upaya mengembangkan kemampuan posisi tawar warga masyarakat sehingga belum mampu meningkatkan kesejahteraan hidupnya diseluruh bidang dan sektor kehidupan. Yang terjadi justru keadaan dimana kelompok masyarakat atau lembaga kemasyarakatan dan organisasi masyarakat banyak yang kehilangan kemampuannya untuk mandiri, baik dalam berprakarsa, karena sistemnya terpusat dan pola pembangunan *top-down* dari atas ke bawah.

Malinau merupakan salah satu kabupaten di Kalimantan Utara yang tingkat pembangunannya berkembang pesat. Program besar yang dicanangkan bupati, yakni Gerakan Desa Membangun (Gerdema) sangat berpengaruh terhadap kegiatan pembangunan ditiap-tiap desa. Desa Tanjung Lapang merupakan wilayah administrasi Malinau yang juga menjadi ibukota dari kecamatan Malinau Barat ini memiliki luas wilayah $\pm 11.967,56$ Ha dengan jumlah penduduk 3.407 jiwa dan merupakan desa yang letak wilayahnya cukup jauh dari pusat pemerintahan Kabupaten Malinau.

Sumber mata pencaharian penduduk di Desa Tanjung Lapang untuk kondisi sekarang yang lebih mendominasi yaitu pada sektor agraris. hal ini disebabkan setiap warga masyarakat secara turun temurun pasti memiliki tanah yang digunakan untuk bertani atau berkebun, hal ini telah menjadi kebiasaan masyarakat sejak dulu. Selain itu, tingkat pengangguran di Desa Tanjung Lapang lumayan tinggi hal ini disebabkan rendahnya tingkat pendidikan. Hal ini disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan serta faktor ekonomi yang masih rendah, sehingga tidak dapat memiliki pekerjaan yang baik, hal ini sering dialami anak-anak muda didesa tanjung lapang, mereka malu untuk ikut bertani atau berkebun dengan orangtuanya sehingga menjadi pengangguran yang akhirnya menjadi beban orang tua dan pemerintah, sehingga dapat dikatakan SDM di Desa Tanjung lapang masih sangat rendah.

Demikian juga halnya pemanfaatan teknologi tepat guna, banyak masyarakat yang belum mengerti bagaimana cara pemakaian alat-alat tersebut padahal pemanfaatan teknologi tepat guna berguna untuk meningkatkan hasil produktivitas pertanian dan perkebunan yang nantinya diharapkan memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, dalam hal ini BPMD

berperan aktif sebagai mitra kerja pemerintahan desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan berbagai uraian sebagaimana diatas, maka penulis sangat tertarik untuk meneliti mengenai : " *Studi Tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) dalam Pembangunan Desa di Desa Tanjung Lapang*

Kerangka Dasar Teori

Pengertian Pelaksanaan atau Implementasi

Pelaksanaan atau implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang/berkepentingan baik pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mewujudkan cita - cita/tujuan yang telah ditetapkan

Selanjutnya menurut Mazmanian dan Sebastiar dalam Wahab (2008:68) Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Sedangkan Van Meter dan Van Horn dalam Wahab (2008:65) mengemukakan pengertian Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. Browne dan Wildavsky (dalam Nurdin dan Usman, 2003:7) mengemukakan bahwa "implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan".

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program – program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Secara umum dapat digambarkan sebagai berikut :

Implementasi merupakan tindakan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan, tindakan tersebut dilakukan baik oleh individu, pejabat pemerintah ataupun swasta. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

Pengertian Tugas dan Fungsi

Tugas Pokok dan Fungsi secara umum merupakan hal-hal yang harus bahkan wajib dikerjakan oleh seorang anggota organisasi atau pegawai dalam suatu instansi secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan program kerja yang telah dibuat berdasarkan tujuan, visi dan misi suatu organisasi.

Adapun definisi tugas menurut para ahli, yaitu Dale Yoder dalam Moekijat (1998:9), Tugas digunakan untuk mengembangkan satu bagian atau satu unsur dalam suatu jabatan. Sementara Stone dalam Moekijat (1998:10), mengemukakan bahwa suatu tugas merupakan suatu kegiatan pekerjaan khusus yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Definisi lainnya yang menilai bahwa tugas merupakan suatu kegiatan spesifik yang dijalankan dalam organisasi yaitu menurut John & Mary Miner dalam Moekijat (1998:10), menyatakan bahwa tugas adalah kegiatan pekerjaan tertentu yang dilakukan untuk suatu tujuan khusus.

Pengertian fungsi menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia merupakan kegunaan suatu hal, daya guna serta pekerjaan yang dilakukan. Adapun menurut para ahli, definisi fungsi yaitu menurut The Liang Gie dalam Nining Haslinda Zainal (Skripsi: “Analisis Kesesuaian Tugas Pokok dan Fungsi dengan Kompetensi Pegawai Pada Sekretariat Pemerintah Kota Makassar”,2008), Fungsi merupakan sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifatnya, pelaksanaan ataupun pertimbangan lainnya. Definisi tersebut memiliki persepsi yang sama dengan definisi fungsi menurut Sutarto dalam Nining Haslinda Zainal (2008:22), yaitu Fungsi adalah rincian tugas yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh seorang pegawai tertentu yang masing-masing berdasarkan sekelompok aktivitas sejenis menurut sifat atau pelaksanaannya. Sedangkan pengertian singkat dari definisi fungsi menurut Moekijat dalam Nining Haslinda Zainal (2008:22), yaitu fungsi adalah sebagai suatu aspek khusus dari suatu tugas tertentu.

Pembangunan

Pembangunan Negara dan Bangsa bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur yang merata, material, spiritual, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945/ dalam wadah Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hubungan ini hakekat pembangunan tersebut adalah proses perubahan yang terus menerus yang merupakan kemajuan dan perbaikan menuju kearah yang ingin dicapai.

Menurut Efendi (2002:9) Pembangunan mempunyai arti : “ suatu upaya meningkatkan segenap sumber daya yang dilakukan secara terencana dan berkelanjutan dengan berprinsip daya guna dan hasilnya merata serta berkeadilan. Menurut Siagian (2001 : 23) Pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara dan pemerintah menuju modernisasi dalam rangka pembinaan bangsa. Kemudian menurut Poerwadarminta (2002 : 88) Pembangunan adalah suatu perubahan dimana perubahan tersebut diharapkan dapat memperbaiki yang lama.

Sedangkan menurut Agus Suryono (2008 : 62) pengertian pembangunan adalah upaya yang terus menerus dilakukan dengan tujuan menetapkan manusia pada posisi dan perannya secara wajar yakni sebagai subjek dan objek

pembangunan untuk mampu mengembangkan dan memberdayakan dirinya sehingga keluar dapat berhubungan secara serasi, selaras, dan dinamis, sedangkan kedalam mampu menciptakan keseimbangan.

Pembangunan secara partisipasi menurut I Nyoman Sumaryadi (2010: 46) Partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil –hasil pembangunan.

Pembangunan Desa

Pembangunan Desa merupakan bagian dari Pembangunan Nasional dan Pembangunan Desa ini memiliki arti dan peranan yang penting dalam mencapai tujuan nasional, karena desa beserta masyarakatnya merupakan basis dan ekonomi, politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan.

Kartasmita (2001 : 66) mengatakan bahwa hakekat pembangunan nasional adalah manusia itu sendiri yang merupakan titik pusat dari segala upaya pembangunan dan yang akan dibangun adalah kemampuan dan kekuatannya sebagai pelaksana dan yang akan dibangun adalah kemampuan dan kekuatannya sebagai pelaksana dan penggerak pembangunan.

Pada hakekatnya pembangunan desa dilakukan oleh masyarakat bersama-sama pemerintah terutama dalam memberikan bimbingan, pengarahan, bantuan pembinaan, dan pengawasan agar dapat ditingkatkan kemampuan masyarakat dalam usaha menaikan taraf hidup dan kesejahteraannya.

Kebijakan pembangunan perdesaan tahun 2010-2014 diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat perdesaan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Memperluas akses masyarakat terhadap sumber daya produktif untuk pengembangan usaha seperti lahan, prasarana sosial ekonomi, permodalan, informasi, teknologi dan inovasi, serta akses masyarakat ke pelayanan publik dan pasar.
2. Meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan melalui peningkatan kualitasnya, dan penguatan kelembagaan serta modal sosial masyarakat perdesaan berupa jaringan kerjasama untuk memperkuat posisi tawar.
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan dengan memenuhi hak-hak dasar.
4. Terciptanya lapangan kerja berkualitas di perdesaan, khususnya lapangan kerja non pemerintah.

Pembangunan Masyarakat Desa pada dasarnya adalah bertujuan untuk mencapai suatu keadaan pertumbuhan dan peningkatan untuk jangka panjang dan sifat peningkatan akan lebih bersifat kualitatif terhadap pola hidup warga masyarakat, yaitu pola yang dapat mempengaruhi perkembangan aspek mental (jiwa), fisik (raga), intelegensia (kecerdasan) dan kesadaran bermasyarakat dan bernegara. Akan tetapi pencapaian objektif dan target pembangunan desa pada

dasarnya banyak ditentukan oleh mekanisme dan struktur yang dipakai sebagai Sistem Pembangunan Desa.

Dari uraian diatas menjelaskan bahwa pembangunan merupakan perpaduan antara partisipasi masyarakat dan kegiatan pemerintah. Pemerintah berkewajiban menyediakan prasarana-prasarana sedangkan selebihnya diberikan kepada masyarakat itu sendiri, karena pada hakekatnya pembangunan itu dilaksanakan oleh masyarakat itu sendiri. Jadi dalam melaksanakan pembangunan manusia itu sendiri yang merupakan titik pusat dari segala upaya pembangunan dan yang akan dibangun adalah kemampuan dan kekuatan sebagai pelaksana dan penggerak pembangunan. Dalam hal ini pemerintah yang memberikan pengawasan, bimbingan, bantuan, serta pembinaan kepada masyarakat

BPMD (Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa)

Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah salah satu instansi yang berupaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, mengkoordinasikan, membina dan memfasilitasi pelaksanaan program-program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

BPMD di Malinau sendiri diatur didalam Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 5) tentang Susunan dan Organisasi Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah. Sesuai dengan program pembangunan yang dicanangkan pemerintah Kabupaten Malinau yaitu GERDEMA.

Jenis penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Menurut Nawawi (2006:63) menyatakan bahwa 'metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur atau cara pemecahan masalah penelitian dengan memaparkan keadaan objek yang diselidiki (seseorang, lembaga, masyarakat, pabrik, dan lain-lainnya) sebagaimana adanya, berdasarkan fakta-fakta yang aktual pada saat sekarang.

Penulis menggunakan jenis penelitian ini dengan tujuan memaparkan dan untuk memberikan gambaran serta penjelasan dari variable yang diteliti, dalam hal ini adalah Studi tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi BPMD dalam Pembangunan Desa di Desa Tanjung Lapang Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau.

Fokus Penelitian

Fokus penelitian sangat berperan penting dalam suatu penelitian. Moleong (2001:62) Menekankan pentingnya fokus penelitian dalam kualitatif dengan ungkapan bahwa, " masalah dalam penelitian dinamika fokus". Maksud penentuan fokus ini adalah untuk membatasi studi dalam penelitian dan mampu memenuhi kriteria suatu informan di lapangan sehingga dapat diketahui data mana yang perlu diambil dari data mana yang sedang dikumpulkannya kemudian diolah sehingga menjadi suatu kesimpulan.

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah :

1. Pelaksanaan peran BPMD dalam Pembangunan Desa di Desa Tanjung Lapang, meliputi :
 - a. Menyelenggarakan seluruh kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh kepala BPMD Malinau dalam kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat desa Tanjung Lapang.
 - b. Mengkoordinasikan dengan staf-staf BPMD beserta Kepala Desa Tanjung Lapang dan ketua-ketua RT tentang perencanaan pembangunan di desa tersebut.
 - c. Membina dan Memfasilitasi seluruh rangkaian kegiatan pembangunan Desa Tanjung Lapang.
 - d. Mengevaluasi jalannya program pembangunan.
2. Kendala – kendala yang dihadapi BPMD dalam melakukan Tugas Pokok dan Fungsinya.

Menyelenggarakan seluruh kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh kepala BPMD Malinau dalam kaitannya dengan pembangunan desa Tanjung Lapang.

Peran BPMD Malinau dalam melakukan pemberdayaan masyarakat salah satunya dengan cara melakukan kegiatan yang bertujuan untuk membangun desa-desa di Kab.Malinau. Salah satu desa yang mendapatkan bantuan langsung dari BPMD Malinau adalah desa Tanjung Lapang yang terletak di Kecamatan Malinau Barat.

BPMD Kab.Malinau dalam kegiatan pembangunan berfungsi sebagai pengontrol, pengawas jalannya serangkaian kegiatan pembangunan karena BPMD Kab. Malinau merupakan badan yang dipercaya bupati sebagai wadah untuk perumusan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat desa.

Kebijakan yang diselenggarakan BPMD sudah jelas dan sesuai dengan program pemerintah Kabupaten Malinau yakni Gerdema. Bahwa Tugas dan Fungsi BPMD dalam menyelenggarakan beberapa kebijakan pembangunan sudah terencana dengan baik ini dapat dilihat dari upaya BPMD untuk merumuskan program-program pembangunan dan pemberdayaan bersama dengan masyarakat melalui MusrenbangDes dan juga bekerja sama dengan aspek-aspek yang terkait dengan program pembangunan tersebut, dan dibuktikan dengan beberapa kebijakannya yang terealisasi seperti pembangunan siring yang sudah dalam tahap

pembangunan kemudian juga pembenahan sarana umum seperti pengaspalan jalan raya di desa tanjung lapang sejauh 10 km, lalu pemberian beberapa sarana produksi di sektor pertanian dan perkebunan seperti bantuan berupa bibit tanaman pertanian maupun perkebunan serta sarana teknologi tepat guna juga ditingkatkan agar dapat mendukung kinerja warga dalam bekerja sehingga mampu meningkatkan perekonomian warga, sedangkan untuk pembangunan jembatan masih terkendala dalam mencari tender yang tepat dalam pembangunan ini serta terbatasnya anggaran dana yang di keluarkan pemerintah daerah kabupaten Malinau.

Mengkoordinasikan dengan staf-staf BPMD dan Dinas-dinas beserta Kepala Desa Tanjung Lapang dan ketua-ketua RT tentang perencanaan pembangunan di desa tersebut.

Salah satu fungsi BPMD ialah koordinasi, jadi BPMD berfungsi mengkoordinasikan bersama staf-stafnya dan dinas-dinas lainnya yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat serta Kepala Desa Tanjung Lapang dan Masyarakatnya. Fungsi koordinasi disini ialah BPMD selaku penanggung jawab dalam pemberdayaan masyarakat desa harus mampu bekerja sama dengan dinas-dinas yang terkait serta seluruh elemen-elemen masyarakat termasuk warga juga, karena memang harus dibutuhkan dalam pemberdayaan masyarakat. BPMD sendiri memang tidak bisa bekerja sendiri dalam memberdayakan masyarakat desa karena ada sebagian aspek-aspek yang memang bukan berada di bidangnya seperti pengadaan alat-alat pertanian dan perkebunan maupun bahan-bahan bangunan untuk infrastruktur desa.

Fungsi koordinasi yang dilakukan BPMD dalam setiap menggagas suatu rancangan pembangunan sejauh ini dapat dilaksanakan dengan baik, ini dibuktikan dengan BPMD mengupayakan agar seluruh sektor-sektor penunjang pembangunan untuk ikut terlibat dalam menggagas program pembangunan, baik di dalam ruang lingkup BPMD maupun di luar lingkup BPMD. Untuk didalam ruang lingkup sendiri, BPMD mampu mengajak peran serta para staf-stafnya untuk membuat suatu rancangan program pembangunan, mulai dari mempresentasikan rencana-rencana yang akan menjadi prioritas pembangunan. Sedangkan yang berada di luar lingkungnya, BPMD juga bersama dinas-dinas terkait yang terdapat di malinau melakukan musyawarah terkait dengan rencana program pembangunan melalui pertemuan-pertemuan khusus sesuai yang diagendakan yang kemudian akan membahas penyusunan program pembangunan tersebut mulai dari tempat dan waktu pelaksanaan, dan membahas anggaran yang akan dikeluarkan selama pembangunan berlangsung yang kemudian akan disampaikan bersama kepada masyarakat desa melalui Musrenbang Desa.

Membina dan Memfasilitasi seluruh rangkaian kegiatan pembangunan Desa Tanjung Lapang.

Membina dan memfasilitasi seluruh rangkaian kegiatan pembangunan Desa Tanjung Lapang sangat penting di lakukan agar didalam pengerjaannya tidak menemui kesulitan. Oleh karena itu dalam hal ini BPMD harus mampu membina dan memfasilitasi kepada desa untuk pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya sendiri. Jadi disini BPMD kembali untuk bekerja sama dengan dinas-dinas lainnya yang terkait dengan kegiatan pembangunan, seperti dinas PU, dinas Pertanian dan Perikanan guna mendapatkan bantuan berupa fasilitas-fasilitas penunjang bagi terciptanya pemberdayaan masyarakat.

Membina disini dapat dikatakan sebagai upaya BPMD Kab. Malinau dalam melakukan kegiatan pembangunan yang langsung turut serta dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa Tanjung Lapang dan berusaha semaksimal mungkin agar proses berjalannya pembangunan tidak memakan waktu yang lama sehingga dapat dikerjakan secara efektif dan efisien. Sedangkan dalam memfasilitasi kegiatan pembangunan, BPMD berupaya untuk bekerja sama dengan dinas-dinas terkait yang berada di Malinau untuk memfasilitasi segala yang diperlukan Desa Tanjung Lapang, seperti bahan-bahan bangunan, bahan-bahan pertanian, bibit ikan, dan membimbing masyarakat dalam penggunaan teknologi tepat guna. Jadi dengan demikian dapat dikatakan bahwa BPMD berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Tanjung Lapang dengan terjun langsung ke lapangan dan mengkoordinir jalannya pembangunan serta memfasilitasi segala yang dibutuhkan bersama dinas-dinas yang terkait.

Masyarakat Desa Tanjung Lapang sangat mengapresiasi sekali kinerja dari BPMD sendiri, karena menurut mereka BPMD sudah melakukan kerjanya dengan baik sesuai dengan tupoksi yang mereka miliki yakni dalam hal membina dan memfasilitasi segala program yang direncanakan. Karena mereka sangat terbantu sekali dengan program-program BPMD apalagi bantuan yang diberikan dapat meningkatkan kinerja mereka sehingga disisi lain menguntungkan kedua belah pihak. Selain dalam hal pembangunan infrastruktur bagi masyarakat yang dapat mereka nikmati sehari-hari, juga terdapat pembinaan dalam menggunakan Teknologi Tepat Guna seperti mesin-mesin pengolah hasil perkebunan maupun pertanian yang dapat meningkatkan kualitas bahan yang dihasilkan sehingga derajat para masyarakat desa semakin berkembang dan meningkat. Selain itu dengan dilakukannya pembinaan dan pemberian fasilitas dapat menimbulkan rasa partisipatif masyarakat dalam pembangunan agar dapat meningkatkan kreatifitas masyarakat desa tersebut sehingga wujud dari pemberdayaan tersebut dapat terlihat.

Mengevaluasi jalannya program pembangunan dan melaporkan penyelenggaraan pembangunan ke Bupati.

Pada dasarnya, evaluasi ialah suatu cara untuk menilai apakah suatu kebijakan atau suatu program berjalan dengan baik atau tidak. Suatu evaluasi

sangat diperlukan ketika ingin mengatasi sebuah permasalahan. Evaluasi juga menjadi salah satu tingkatan dalam proses pengambilan kebijakan publik. Evaluasi itu sendiri menjadi langkah akhir dalam proses pengambilan suatu kebijakan yang tentunya kebijakan tersebut berdasar pada aktivitas sebelumnya. Oleh karenanya, evaluasi terhadap kebijakan publik dipandang sebagai kegiatan fungsional karena semua elemen kebijakan tersebut dari awal sampai terbentuknya kebijakan terus dievaluasi.

Proses evaluasi kemudian akan dilakukan oleh BPMD dengan melibatkan seluruh dinas-dinas yang bekerja sama dengan BPMD yang terkait dengan bidangnya masing-masing. Hal ini dapat dilihat bahwa BPMD berkoordinasi dengan dinas-dinas lainnya guna membahas evaluasi program yang sudah dibangun atau yang masih berjalan, selain itu mereka membahas masalah waktu pengerjaannya apakah sesuai yang ditargetkan atau tidak, lalu juga mengevaluasi kendala-kendala yang dihadapi selama pembangunan berlangsung, hal ini perlu dilakukan mengingat betapa pentingnya pembangunan tersebut selain itu juga akan menjadi acuan dalam rencana pembangunan kedepannya. BPMD juga tak luput dalam melaporkan hasil evaluasi tersebut ke Bupati.

Kendala yang dihadapi BPMD dalam melakukan pemberdayaan masyarakat.

BPMD Kabupaten Malinau sudah melakukan kerjanya dengan baik sesuai dengan Tugas pokok dan fungsinya sendiri. Hal ini terlihat dari beberapa proyek pembangunan yang di gagas BPMD keseluruhannya sudah dapat dikatakan selesai dan bisa digunakan masyarakat. Seperti yang kita ketahui bahwa proyek pemeliharaan infrastruktur umum seperti pengaspalan jalan, pembangunan siring sungai dll. Selain itu untuk mengeksplorasi kemampuan masyarakatnya, BPMD juga tak luput untuk memberikan fasilitas penunjang ke masyarakat melalui bantuan berupa bibit tanaman perkebunan maupun pertanian, juga ada penyuluhan tentang penggunaan metode teknologi tepat guna agar kinerja mereka dapat meningkat. Namun beberapa diantaranya menemui jalan buntu pembangunannya, salah satunya pembangunan jembatan yang sejauh ini belum di mulai pengerjaannya karena keterbatasan dana serta mahalanya harga-harga material bangunan. Juga kurangnya peran anak-anak muda desa dalam membantu program pemberdayaan masyarakat. BPMD disini selaku yang bertindak sebagai penanggungjawab kegiatan pembangunan akan mengupayakan segala kekuatannya agar pembangunannya segera rampung dan dapat dinikmati masyarakat bersama sehingga dapat mewujudkan visi mereka yakni “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Malinau yang Mandiri Melalui Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa”.

Penutup

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dilakukan oleh BPMD sejauh ini sudah cukup baik, hal ini terlihat dari upayanya dalam pembangunan serta pemberdayaan masyarakat desa Tanjung Lapang. Seperti yang penulis

kemukakan sebelumnya, BPMD telah melakukan beberapa program pembangunan desa, contohnya pengaspalan jalan, pembangunan siring sungai, pembangunan jembatan, pemeliharaan infrastruktur desa, bantuan bibit, pupuk dan pestisida bagi petani dan kelompok tani serta penggunaan teknologi tepat guna bagi masyarakat desa Tanjung Lapang. BPMD juga berperan penting dalam meningkatkan peran masyarakat desa Tanjung Lapang untuk ikut membantu program-program dari BPMD tersebut.

BPMD selaku badan yang mengawasi jalannya program pembangunan serta pemberdayaan masyarakat desa sudah mampu menjalankan pekerjaannya sesuai dengan TUPOKSI yang di buatnya. Dalam pelaksanaannya, BPMD Menyelenggarakan seluruh kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh kepala BPMD Malinau dalam kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat desa Tanjung Lapang, lalu mengkoordinasikan dengan staf-staf BPMD beserta Kepala Desa Tanjung Lapang dan ketua-ketua RT tentang perencanaan pembangunan di desa tersebut, serta membina dan memfasilitasi seluruh rangkaian kegiatan pembangunan Desa Tanjung Lapang dan mengevaluasi jalannya program pembangunan.

Walaupun terlihat sukses dalam penyelenggaraannya, program pembangunan yang digagas BPMD masih ada kekurangannya, hal ini terlihat dari adanya proyek yang masih belum dibangun yakni, pembangunan jembatan antara desa tanjung lapang dengan wilayah perkebunan warga. Hal ini disebabkan karena adanya keterbatasan dana yang di anggarkan Bupati serta mahalnnya harga kebutuhan material saat ini sehingga belum menemukan pemegang tender yang mengerjakan jembatan tersebut. Oleh karena itu pembangunan difokuskan ke lainnya sembari menunggu kebijakan Bupati selanjutnya.

Daftar Pustaka

- Abdul Wahab, Solichin. 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press.
- Ahmadi, A, Uhbiyati, N. (2001). *Ilmu pendidikan*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Donnelly, Ivancevich dan Gibson, 1993. *Organisasi (Terjemahan, Edisi Kelima)*. Surabaya : Erlangga
- Effendy, Onong Uchjana. 2002. *Hubungan Masyarakat Suatu Studi Komunikologis*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Fasli Djalal & Dedi Supriadi (eds). (2001). *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa.
- H.A.R Tilaar (2009). *Kekuasaan dan Pendidikan: Manajemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Idrus, Muhammad. 2007. *Metode Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial (Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif)*. Yogyakarta. UII Press Yogyakarta
- I Nyoman Sumaryadi. (2010). *Efektifitas Implementasi Otonomi Daerah*. Jakarta: Citra Utama.

- Kartasasmita, Ginjar 1995. *Pemberdayaan Masyarakat Sebuah Tinjauan Administrasi Pidato Pengakuan Pengakuan Jabatan Guru Besar Dalam Ilmu Administrasi Pada Fakultas Ilmu Administrasi*. Univrsitas Brawijaya, Malang.
- Kartasasmita, Ginandjar, 2001. *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan Dan Pemerataan*, Jakarta : Pustaka CIDESINDO.
- Moekijat, 1998. *Analisis Jabatan*, Bandung : Mandar Maju
- Moleong J. Lexy, 2001. *Metodeologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda karya, Jakarta.
- Nawawi, Hadari. 2006. *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ndraha, Taliziduhu. 1990. *Pembangunan Masyarakat Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Zainal , Nining Haslinda . 2008. *Analisis Kesesuaian Tugas Pokok dan Fungsi dengan Kompetensi Pegawai Pada Sekretariat Pemerintah Kota Makassar*. Makassar : FISIPOL
- Nurdin, Syafruddin dan Usman, Basyiruddin. 2003. *Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum*. Jakarta: Ciputat Press.
- Poerwadarminta, W.J.S. 2002. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Siagian, Sondang. P, 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Bumi Aksara
- Suparno, A.Suhaenah. 2001. *Membangun Kompetensi Belajar*. Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi : Departemen Pendidikan Nasional.
- Suryono, Agus, 2008, *Teori Dan Isu Pembangunan*, Universitas Negeri Malang, UM Press.
- Tjokroamidjojo, 1990. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta : LP3ES
- Widjaja, HAW. 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Asli Bulat dan Utuh*. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Dokumen – dokumen :

- Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional.
- Undang-undang No 32 Tahun 2004 Tentang pemerintahan daerah.
- Peraturan Pemerintah No 72 tahun 2005 tentang pengaturan mengenai desa
- Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan dan Organisasi Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah